



**CATATAN AWAL TAHUN 2017 DAN EVALUASI MASA  
SIDANG II TAHUN PERSIDANGAN 2016-2017**

**“PERKIRAAN KINERJA DPR 2017”**

---

**SENIN, 9 JANUARI 2017**

**JL. MATRAMAN RAYA 32 B, JAKARTA TIMUR**

PAPARAN FORMAPPI

---

LIPUTAN MEDIA

---

## PAPARAN FORMAPPI

---



## PERKIRAAN KINERJA DPR 2017 M. DJADIJONO

### **Kilas Balik Kinerja DPR 2016**

Di tahun 2016, DPR diwarnai oleh berbagai citra negative, antara lain: “suka-suka” mengganti Ketua DPR dan merubah kebijakan masa reses, maupun pembebasan kunker ke luar negeri.

Dalam merancang dan merampungkan penyusunan RUU (baru maupun revisi) juga nampak terjadi inkonsistensi (suka-suka) juga. Selama tahun 2016, tiga kali melakukan perubahan daftar RUU Prioritas dengan melakukan penambahan pada daftar yang telah disepakati bersama pada 26 Januari 2016. Perubahan-perubahan tersebut terjadi: (1) pada 20 Juni 2016 (dengan menambahkan 10 RUU Prioritas); (2) pada 15 Desember 2016 (Paripurna Penutupan Masa Sidang/MS II) dengan menambah 1 (satu) RUU yakni Revisi UU MD3, sehingga total RUU Prioritas menjadi 51 buah. Kecuali itu, pembahasan serta penyelesaian revisi UU MD3 2014 dapat dilakukan di masa reses MS II Tahun Sidang (TS) 2016-2017. Sebaliknya penyelesaian dan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan RUU tentang Perubahan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Sosial, dan RUU tentang Perkelapasawitan yang diagendakan akan diselesaikan pada MS II TS 2016-2017, sampai dengan Rapat Paripurna penutupan MS II belum berhasil disahkan. Ini menandakan bahwa penyusunan Prolegnas Prioritas maupun pembahasan dan penyelesaian pembahasan RUU tunduk pada kepentingan politik fraksi-fraksi di DPR, bukan mengacu pada urutan kebutuhan prioritas bangsa yang sesungguhnya.

Pelaksanaan fungsi anggaran juga kurang berpihak pada kepentingan publik. Sebab dari total 87 Kementerian/Lembga (K/L) yang ada, lembaga legislatif (DPR, DPD, dan MPR) tidak potong. Lebih dari itu, penyusunan dan pembahasan serta penetapan Anggaran DPR tidak transparan, dan korupsi anggaran negara oleh anggota DPR masih terus terjadi. Padahal Ketua DR, Ade Komarudin berkomitmen untuk mendorong transparansi dengan melibatkan publik dalam proses-proses pembahasan anggaran di DPR sebagai salah satu cara untuk mencegah praktek transaksional dan suap dalam pembahasan anggaran.

Jl. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur  
13150, Indonesia. T: 021-8193324; F: 021-  
85912938; E:formappi@cbn.net.id;  
W: [www.parlemenindonesia.org](http://www.parlemenindonesia.org) .

Fakta ini mengkonfirmasi adanya dugaan transaksi politik antara pemerintah dan legislatif melalui instrument anggaran negara (APBN) dan para wakil rakyat ini tidak sensitif dengan kondisi keuangan negara yang kurang menguntungkan. Anggota parlemen terkesan lebih mementingkan diri sendiri dibanding kepentingan rakyat. Anggaran belanja legislative tidak dipotong, sebaliknya anggaran K/L yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan justru disetujui dipotong.

Di sisi pelaksanaan fungsi pengawasan, kinerja DPR selama tahun 2016 juga tidak nampak keseriuannya. Salah satu aspek pengawasan oleh DPR yang sangat strategis adalah pengawasan pelaksanaan APBN oleh K/L berdasarkan temuan-temuan BPK. Selama tahun 2016, BPK telah dua kali menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semesteran atas penggunaan keuangan Negara oleh K/L, yaitu: IHPS II 2015 (disampaikan pada 12 April 2016) dan IHPS I 2016 (disampaikan pada 4 Oktober 2016). Pada IHPS II 2015 dan IHPS I 2016, BPK melaporkan terjadinya ketidakpatuhan K/L terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kerugian keuangan Negara dan kekurangan penerimaan Negara yang cukup besar. Di sisi lain, setoran ke kas Negara oleh K/L atas kerugian Negara dan kekurangan penerimaan Negara masih sangat kecil (lihat tabel 1).

**Tabel 1:**

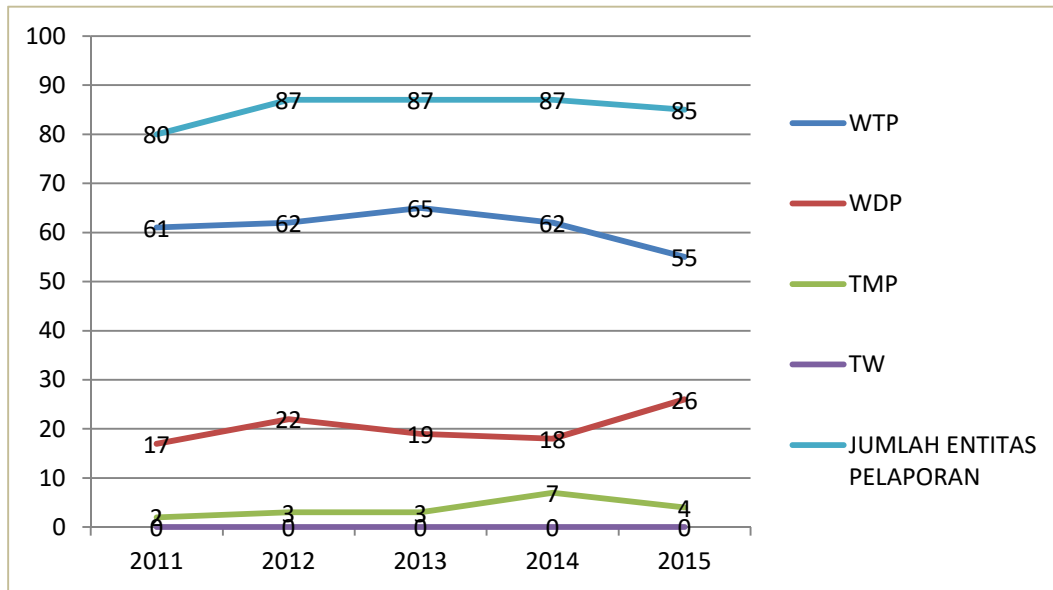
No	Keterangan	Nilai Temuan (Rp juta)	Nilai Penyerahan Aset/Penyetoran ke Kas Negara (Rp juta)	%
1	IHPS II Tahun 2015	2.218.824,80	10.199,04	0,46
2	IHPS I Tahun 2016	18.066.620,90	142.008,85	0,79

Keterangan:

1. Nilai Temuan dan Penyetoran ke Kas Negara dikutip dari BPK, IHPS II 2015 Tabel 1.19, hlm 91 dan BPK, IHPS I 2016 Tabel 2, hlm. xxii
2. Data pada kolom 5 diolah oleh FORMAPPI

Menurut IHPS I 2016, LKKL yang memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari 76% pada tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2015. Sebaliknya LKKL yang memperoleh opini WDP dan TMP dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat dari 21% tahun 2011 menjadi 30% pada tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 opini WTP mengalami penurunan sebesar 6 poin, yakni dari 71% menjadi 65%, opini WDP mengalami kenaikan sebesar 9% dari 21% menjadi 30% dan yang mendapatkan opini TMP mengalami penurunan sebesar 3 poin yakni dari 8% menjadi 5%. Rincian opini BPK terhadap Laporan Keuangan K/L dari waktu ke waktu dapat disimak pada grafik 1.

Grafik 1: Statistik Opini BPK terhadap LKPP K/L 2011- Semester II 2015



Sumber:

- [http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2015/lkpp\\_2015\\_1465542879.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2015/lkpp_2015_1465542879.pdf)
- <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/14362>
- [http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2016/I/ihps\\_i\\_2016\\_1475566035.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2016/I/ihps_i_2016_1475566035.pdf).

Berdasarkan data-data IHPS II 2015 maupun IHPS I 2016, jumlah kerugian Negara, potensi kerugian negara maupun kekurangan penerimaan Negara sangat besar. Di sisi lain, penyetoran ke Kas Negara oleh K/L bermasalah masih sangat kecil. K/L yang bermasalah juga mengalami kenaikan sebesar 133% (dari 6 K/L pada Semester II 2015 menjadi 14 K/L pada Semester I 2016). Ada pula 3 K/L yang berulang bermasalah yaitu: Kemenhub, Kemenkeu serta Kemenristek-Dikti.

Terjadinya kenaikan jumlah LKPP yang mendapat opini WDP menunjukkan bahwa pengawasan Komisi-komisi DPR tidak efektif untuk memperbaiki opini LKPP yang menjadi mitra kerjanya. Sedangkan terjadinya kenaikan jumlah LKPP yang mendapat opini WDP menunjukkan terjadinya pembiaran oleh Komisi-komisi DPR. Padahal menurut Pasal 72 huruf (e) UU No. 17/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42/2014, temuan-temuan BPK tersebut wajib ditindaklanjuti oleh DPR melalui Komisi-komisi Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat dengan pasangan kerjanya masing-masing. Namun jika dirunut dari realisasi rapat-rapat Komisi dengan pasangan kerjanya masing-masing, keseriusannya untuk mengejar K/L agar menindaklanjuti temuan BPK tidak dilakukan dengan gencar. Bahkan seolah-olah tidak peduli atau mengabaikan kerugian keuangan Negara.

Berdasarkan Laporan BPK tentang temuan berunsur tindak pidana masih ada 26 temuan senilai Rp. 2,383 trilyun yang belum ditindaklanjuti oleh KL. 26 temuan ini seharusnya dikejar Komisi-komisi DPR instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Apalagi DPR juga telah membentuk Panja Penegakan Hukum.

Jika Pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara berjalan efektif, maka seharusnya dapat meningkatkan kinerja K/L dalam pengelolaan keuangan negara sehingga

dapat naik derajat dari opini TMP ke WDP dan akhirnya menjadi WTP. Namun dalam kenyataannya masih ada 5 K/L yang stabil jelek mendapatkan opini WDP dari tahun ke tahun.

Terkait dengan pengawasan, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat terhadap Pemerintah, tetapi hak-hak tersebut tidak dioptimalkan. Kecuali hanya ada satu yaitu pernah dibentuknya Pansus Pelindo II pada Oktober 2015. Tetapi Rekomendasinya tidak diperhatikan oleh Pemerintah. Rekomendasi Pansus adalah: Presiden diminta memberhentikan Menteri BUMN Rini Sumarno, sementara Menteri Rini direkomendasikan memecat Dirut Pelindo II, R.J. Lino. Sekalipun rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak direspon positif oleh Pemerintah, DPR tidak menindaklanjutinya dengan penggunaan hak menyatakan pendapat.

Pengawasan yang filosofinya harus mampu memperbaiki kekurangan/kelemahan kinerja entitas yang diawasi nampak tidak efektif. Hal itu nampak pada bertambahnya K/L yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK dan turunnya jumlah K/L yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

### **Prediksi Kinerja DPR tahun 2017**

Mengacu pada wajah politik 2016, kinerja DPR di tahun 2017 dapat diperkirakan belum akan mengalami perbaikan. Tahun 2017 akan diwarnai oleh event-event seperti berikut: *Pertama*, tahun 2017 merupakan awal “tahun politik,” tahun dimana perebutan kekuasaan politik berlangsung, antara lain berupa pelaksanaan Pilkada serentak 15 Februari 2017.

*Kedua*, di tahun 2017 ini juga akan dilakukan seleksi komisioner KPU dan Bawaslu, serta dilakukannya revisi UU Pileg maupun UU Pilpres yang berkaitan langsung dengan kepentingan politik Parpol induk organisasi semua anggota DPR.

*Ketiga*, pada tahun 2017, salah satu agenda pelaksanaan fungsi anggaran DPR adalah pembahasan APBN-P 2017 dan APBN 2018. Patut diduga, terkait dengan pembahasan anggaran tersebut, DPR akan memanfaatkannya sebagai ajang ‘*bergaining position*’ dengan pemerintah demi kepentingan anggota dan/atau partai politik demi memenangkan perebutan kekuasaan pada Pemilu 2019. Usul dan wacana pendanaan partai politik dari APBN yang nilainya sekitar Rp. 1 triliun per parpol tidak mustahil akan menjadi salah satu issue yang akan mewarnai dinamika di internal fraksi-fraksi di DPR dan relasi DPR dan pemerintah dalam proses-proses pembahasan anggaran.

Akhirnya, jika kita mencermati dinamika politik di DPR selama tahun 2016, maka *event-event* 2017 ini tampaknya juga akan diwarnai oleh kompromi politik antar fraksi di DPR. Dan karena itu rakyat masih harus “bersabar” melihat sebagian besar pelaksanaan fungsi-fungsi DPR yang akan sangat pro kepentingan politik sesaat, dan karena itu pula kepentingan rakyat yang diwakili akan terabaikan.

Jakarta, 9 Januari 2017

## LIPUTAN MEDIA

---



## Formappi: Kinerja DPR Tahun 2017 Tak Akan Beda Jauh dengan 2016

Ibnu Hariyanto - detikNews



**Jakarta** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memprediksi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tahun 2017 tak jauh beda dengan tahun 2016. DPR disebut masih akan melakukan perdebatan teknis dan pembahasan undang-undang yang lebih propartai politik daripada yang prorakyat.

Hal itu disampaikan oleh penelitian senior Formappi M Djadijono dalam diskusi awal tahun yang mengangkat tema 'Politik Nasional dan Wajah DPR 2017' di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin (9/1/2017).

"Kinerja DPR tahun 2017 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2016 karena masih akan fokus membahas undang-undang yang lebih mementingkan partai politik daripada kepentingan rakyat," kata Djadijono.

Menurut Djadijono, selama tahun 2016 ada sejumlah perubahan dalam daftar RUU prioritas yang diputuskan oleh DPR. Salah satunya revisi UU MD3.

"Perubahan-perubahan tersebut terjadi pada tanggal 20 Juni 2016 (dengan menambah 10 RUU prioritas). Pada tanggal 15 Desember 2016 (paripurna penutupan masa sidang/MS II) dengan menambah satu RUU, yakni RUU MD3. Sehingga total RUU prioritas menjadi 51 buah," catat Djadijono.

Djadijono mengatakan RUU tersebut sampai penutupan MS II belum berhasil disahkan

juga. Dia menilai hal itulah yang menunjukkan bahwa pembahasan dan penyelesaian RUU tunduk pada kepentingan partai politik.

"Ini menandakan bahwa penyusunan Prolegnas prioritas maupun pembahasan dan penyelesaian pembahasan RUU tunduk pada kepentingan partai politik fraksi-fraksi di DPR, bukan mengacu pada urutan kebutuhan prioritas bangsa yang sesungguhnya," ungkapnya.

Peneliti senior Formappi ini mengatakan, *event-event* yang akan terjadi di tahun 2017, seperti pilkada serentak serta dilakukannya revisi UU Pileg dan Pilpres, membuka peluang DPR bersikap pro kepada kepentingan politik sesaat.

"Maka *event-event* di tahun 2017 ini tampaknya juga akan diwarnai oleh kompromi politik fraksi di DPR," pungkasnya.

**(kst/kst)**

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3391697/formappi-kinerja-dpr-tahun-2017-tak-akan-beda-jauh-dengan-2016>

## Formappi Prediksi Kinerja DPR pada 2017 Belum Alami Perbaikan

Pekerja melakukan perawatan taman Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (9/8). Perawatan dilakukan jelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2016 yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah tamu kenegaraan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

**Liputan6.com, Jakarta** - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Djadjiono memprediksi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (**DPR**) pada 2017 belum mengalami perbaikan seperti tahun sebelumnya. Dia menilai, kinerja DPR pada 2016 diwarnai citra negatif.

"Mengacu pada wajah politik 2016, kinerja DPR di tahun 2017 dapat diperkirakan belum akan mengalami perbaikan," kata Djadjiono di Jakarta, Senin 9 Januari 2017.

Djadjiono berpendapat, 2017 merupakan tahun politik dengan diselenggarakannya pilkada serentak. Menurut dia, tahun politik itu akan berlangsung perebutan kekuasaan.

"Di tahun 2017 ini juga akan dilakukan seleksi komisioner KPU dan Bawaslu serta dilakukannya revisi UU Pileg maupun UU Pilpres yang berkaitan langsung dengan kepentingan politik parpol induk organisasi semua anggota **DPR**," ujar dia.

Adanya agenda-agenda politik pada 2017, Djadjiono menilai kompromi politik antarfraksi-fraksi di DPR akan berlangsung. Pembahasan APBN-P 2017 dan APBN 2018 oleh DPR diduga akan dimanfaatkan sebagai ajang '*bargaining position*' dengan pemerintah demi kepentingan anggota atau partai politik untuk memenangkan perebutan kekuasaan pada Pemilu 2019.

"Dan karena itu rakyat masih harus bersabar melihat sebagian besar pelaksanaan fungsi-fungsi **DPR** yang akan sangat prokepentingan politik sesaat. Dan karena itu pula kepentingan rakyat yang diwakili akan terabaikan," ucap Djadjiono.

Sumber: <http://news.liputan6.com/read/2822561/formappi-prediksi-kinerja-dpr-pada-2017-belum-alami-perbaikan>



## **Formappi Perkiraan Kinerja DPR di 2017 Belum Mengalami Perbaikan**

Senin, 9 Januari 2017 18:01 WIB

**TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA** - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Djadjiono, memprediksi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2017 belum mengalami perbaikan seperti tahun sebelumnya.

Dia menilai kinerja DPR pada 2016 diwarnai oleh citra negatif.

"Mengacu pada wajah politik 2016, kinerja DPR di tahun 2017 dapat diperkirakan belum akan mengalami perbaikan," tegas Djadjiono di kantor Formappi, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Djadjiono berpendapat, tahun 2017 merupakan tahun politik dimana akan berlangsung event-event politik nasional.

Dikatakannya, tahun politik itu akan berangsur perebutan kekuasaan politik yang antara lain pelaksanaan Pilkada serentak.

"Di tahun 2017 ini juga akan dilakukan seleksi komisioner KPU dan Bawaslu serta dilakukannya revisi UU Pileg maupun UU Pilpres yang berkaitan langsung dengan kepentingan politik parpol induk organisasi semua anggota DPR," tuturnya.

Adanya event-event politik di 2017, Djadjiono menilai kompromi politik antar fraksi-fraksi di DPR akan berlangsung.

Dikatakannya, pembahasan APBN-P 2017 dan APBN 2018 oleh DPR diduga akan dimanfaatkan sebagai ajang 'bargaining position' dengan pemerintah demi kepentingan anggota atau partai politik demi memenangkan perebutan kekuasaan pada Pemilu 2019.

"Dan karena itu rakyat masih harus bersabar melihat sebagian besar pelaksanaan fungsi-fungsi DPR yang akan sangat pro kepentingan politik sesaat. Dan karena itu pula kepentingan rakyat yang diwakili akan terabaikan," ujarnya.

Sumber: <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/09/formappi-perkiraan-kinerja-dpr-di-2017-belum-mengalami-perbaikan>

# Harian Detik News

*Akurat dan Berimbang*

## Formappi: Kinerja DPR Tahun 2017 Tak Akan Beda Jauh dengan 2016



**Jakarta, HDN** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memprediksi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tahun 2017 tak jauh beda dengan tahun 2016. DPR disebut masih akan melakukan perdebatan teknis dan pembahasan undang-undang yang lebih propolitis daripada yang prorakyat.

Hal itu disampaikan oleh penelitian senior Formappi M Djadiono dalam diskusi awal tahun yang mengangkat tema 'Politik Nasional dan Wajah DPR 2017' di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur.

"Kinerja DPR tahun 2017 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2016 karena masih akan fokus membahas undang-undang yang lebih mementingkan partai politik daripada kepentingan rakyat," kata Djadiono.

Menurut Djadiono, selama tahun 2016 ada sejumlah perubahan dalam daftar RUU prioritas yang diputuskan oleh DPR. Salah satunya revisi UU MD3.

"Perubahan-perubahan tersebut terjadi pada tanggal 20 Juni 2016 (dengan menambah 10 RUU prioritas). Pada tanggal 15 Desember 2016 (paripurna penutupan masa sidang/MS II) dengan menambah satu RUU, yakni RUU MD3. Sehingga total RUU prioritas menjadi 51 buah," catat Djadijono.

Djadijono mengatakan RUU tersebut sampai penutupan MS II belum berhasil disahkan juga. Dia menilai hal itulah yang menunjukkan bahwa pembahasan dan penyelesaian RUU tunduk pada kepentingan partai politik.

"Ini menandakan bahwa penyusunan Prolegnas prioritas maupun pembahasan dan penyelesaian pembahasan RUU tunduk pada kepentingan partai politik fraksi-fraksi di DPR, bukan mengacu pada urutan kebutuhan prioritas bangsa yang sesungguhnya," ungkapnya.

Peneliti senior Formappi ini mengatakan, *event-event* yang akan terjadi di tahun 2017, seperti pilkada serentak serta dilakukannya revisi UU Pileg dan Pilpres, membuka peluang DPR bersikap pro kepada kepentingan politik sesaat.

"Maka *event-event* di tahun 2017 ini tampaknya juga akan diwarnai oleh kompromi politik fraksi di DPR," pungkasnya.

Sumber: <http://www.hariandetiknews.com/2017/01/formappi-kinerja-dpr-tahun-2017-tak.html>

## Saat Sekretaris Fraksi PAN Keluhkan Kinerja Anggota DPR...



**JAKARTA, KOMPAS.com** - Sekretaris Fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat, Yandri Susanto, mengeluh atas minimnya kehadiran para koleganya di parlemen.

Yandri mengatakan, sebagai bagian dari wakil rakyat, ia merasa prihatin dengan sepiunya anggota DPR dalam berbagai rapat.

"Bagaimana mau menghasilkan sesuatu, rapat penuh pun belum tentu ada hasilnya," kata Yandri dalam sebuah diskusi kantor Formappi, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Yandri merasa bingung atas penyebab ketidakhadiran anggota DPR. Menurut dia, jadwal kerja telah disusun bersama, sehingga beban kerja anggota DPR tidaklah terlalu berat.

"Tapi kenapa paripurna sepi. Habis absen, mereka pergi. Apakah ada yang lebih penting, saya juga tidak tahu," ucap anggota Komisi II itu.

Yandri kemudian menuturkan keheranan lain, yaitu ada rapat tertentu yang dihadiri banyak anggota.

Misalnya, rapat Badan Legislasi (Baleg) penuh saat membahas revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ([UU MD3](#)). Menurut dia, baru kali ini terjadi rapat Baleg dihadiri secara penuh saat masa reses berlangsung.

Karena itu Yandri memahami jika masyarakat tidak memiliki harapan besar kepada DPR. Sebab, lanjut dia, untuk melakukan lompatan jauh terkait kinerja ke depan DPR memerlukan waktu.

"Yang paling penting rapat dulu lah. Minimal paripurna ramai, komisi ramai, panja (panitia kerja) dan pansus (panitia khusus) ramai. Saya kira masyarakat tidak muluk. Kalau mau lompatan luar biasa perlu waktu," ujar dia.

Sebagai Sekretaris Fraksi PAN, Yandri mengatakan telah melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksi PAN setiap bulan.

Jika kehadiran minim, kata dia, anggota fraksi akan dirotasi dari komisi di DPR.

Sumber:

<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/09/21394951/saat.sekretaris.fraksi.pan.keluhkan.kinerja.anggota.dpr>.



## 'Rakyat harus sabar, 2017 DPR lebih ke politik ketimbang rakyat'

**Merdeka.com** - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Djadijono memprediksi kinerja DPR tahun 2017 belum memiliki perbaikan. Hal ini lantaran konsentrasi DPR di tahun ini akan fokus ke pemilihan kepala daerah serentak.

Pergi.com bagi-bagi voucher tiket pesawat Rp 100,000" Tahun 2017 merupakan awal tahun politik. Tahun dimana perebutan kekuasaan politik berlangsung berupa pelaksanaan Pilkada serentak 15 Februari nanti," ujar Djadijono di kantor Formappi, **Jakarta**, Senin (9/1).

Dia menambahkan, kinerja DPR tahun 2016 dan 2017 akan selalu dipenuhi kejadian-kejadian dan pertarungan politik. Belum lagi kompromi politik di DPR yang membahas segala rancangan undang-undang di DPR yang berkaitan dengan pemilihan umum, misalnya seleksi komisioner KPU dan Bawaslu.

Dalam kejadian itu, menurutnya, lobi-lobi anggota parpol harus kuat demi kepentingan politik mereka.

"Selain Pilkada serentak. Tahun ini juga dilakukan seleksi komisioner KPU dan Bawaslu serta dilakukan revisi UU Pileg, dan Pilpres yang berkaitan langsung dengan kepentingan politik Parpol induk organisasi semua anggota DPR," tukasnya.

Tidak sekadar lobi politik dalam hal revisi Undang-undang Pileg atau Pilpres, Djadijono menyebutkan di tahun ini pembahasan APBN-P 2017 dan APBN 2018 juga menjadi ladang bagi anggota DPR melakukan lobi politik dengan pemerintah demi memenangkan perebutan kekuasaan pada Pilpres 2019 nanti.

Adanya wacana pendanaan parpol dalam pencalonan presiden 2019 nanti sebesar Rp 1 triliun per partai politik menjadi dasar Djadijono menduga kinerja DPR di tahun ini masih



berkutat dengan lobi-lobi politik partai.

"Jika kita mencermati dinamika politik di DPR selama 2016 maka event-event 2017 tampaknya juga diwarnai oleh kompromi besar politik antar fraksi DPR," tukasnya.

"Karena itu rakyat harus mesti bersabar melihat sebagian besar pelaksanaan fungsi-fungsi DPR lebih ke kepentingan politik ketimbang kepentingan rakyat," imbuhnya.

Sumber: <https://www.merdeka.com/politik/rakyat-harus-sabar-2017-dpr-lebih-ke-politik-ketimbang-rakyat.html>



## Kinerja DPR Diprediksi Tidak akan Membaik di 2017

**Metrotvnews.com, Jakarta:** Memasuki tahun 2017, kinerja DPR diprediksi tidak akan mengalami perbaikan. Lembaga legislatif itu masih akan disibukkan dengan peristiwa-peristiwa politik nasional.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Djadijono mengatakan, prediksi itu terlihat dari wajah politik tahun 2016. Selain itu, pada tahun 2017 juga akan banyak peristiwa politik yang cukup menyita perhatian.

"Kinerja DPR di tahun 2017 diperkirakan belum akan mengalami perbaikan," tutur Djadijono di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (9/1/2016).

Salah satu peristiwa politik yang akan dihadapi pada awal tahun 2017 ini adalah Pilkada serentak pada Februari mendatang di 101 wilayah di Indonesia. Hal ini, dinilai Djadijono akan cukup menguras waktu dan energi para anggota dewan.

Kemudian, pada tahun 2017 juga akan dilaksanakan seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Belum lagi soal revisi Undang-Undang pemilu, baik legislasi dan presiden yang akan berkaitan langsung dengan kepentingan politik partai-partai yang menjadi induk organisasi seluruh anggota dewan.

"Tidak hanya itu, pada 2017, salah satu agenda pelaksanaan fungsi anggaran DPR adalah pembahasan APBN-P 2017 dan APBN 2018," tutur dia.

Djadijono mengatakan, hal tersebut patut diduga, terkait dengan pembahasan anggaran, DPR akan memanfaatkan momen ini sebagai ajang bargaining position dengan pemerintah demi kepentingan anggota dan parpol demi memenangkan perebutan kekuasaan pada Pemilu 2019.

Usulan dana parpol dari kucuran APBN yang mencapai Rp1 triliun per parpol, kata dia, bukan mustahil akan jadi isu yang mewarnai dinamika di internal fraksi-fraksi di DPR dan hubungan dengan pemerintah dalam proses pembahasan anggaran.

Pada akhirnya, kata dia, dengan mencermati dinamika politik di DPR pada 2016, ia percaya dinamika serupa bakal terulang pada 2017. "Karena itu rakyat masih harus bersabar melihat sebagian besar pelaksanaan fungsi DPR yang akan sangat pro kepentingan politik sesaat," tutur dia.

Sumber: <http://news.metrotvnews.com/politik/gNQxaR5K-kinerja-dpr-diprediksi-tidak-akan-membaik-di-2017>

## Presiden Diminta Tingkatkan Pembangunan Politik Akal Budi

**Jakarta-** Presiden Joko Widodo (Jokowi) diingatkan untuk dapat lebih mengedepankan politik akal budi ketimbang politik instrumen. Semua dilakukan untuk mengingatkan masyarakat bahwa bangsa Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menjelaskan, pembangunan politik tidak melulu dilakukan melalui pembangunan politik instrumen yang melibatkan partai politik. Namun, untuk menjaga keseimbangan, disarankan juga untuk melakukan pembangunan politik akal budi.

Sejak 2015, menurut Ray, fokus perhatian presiden pada pembangunan infrastruktur justru membuat pemerintahan kurang konsentrasi dalam pembangunan politik akal budi. Jika dalam politik instrumen, pemerintahan Jokowi sudah terbilang cukup kuat dengan didukung tujuh partai politik.

"Yang saya mau katakan, berpolitik ini bersifat suprastruktur untuk memperkuat nasionalisme, identitas kebangsaan, dan lain-lain. Ini yang saya lihat presiden tampak tertinggal," kata Ray Rangkuti saat Diskusi Awal Tahun Formappi "Politik Nasional dan Wajah DPR 2017", Senin (9/1) di Jakarta.

Saat ini, diakui, pembangunan infrastruktur juga sangat berimplikasi pada persepsi publik. Kendati demikian, diingatkan, tanpa adanya pembangunan politik akal budi, maka pemerintahan Jokowi akan terus diganggu oleh kekuatan-kekuatan yang merongrong nilai kultural dan toleransi.

Menurutnya, apa yang dihadapi pemerintahan Jokowi pada penghujung 2016 lalu, di mana ada aksi massa besar-besaran dan luntarnya nilai-nilai toleransi antarumat beragama, merupakan imbas dari tidak diperhatikannya pembangunan politik akal budi tersebut.

"Sejak 2015, politik akal budi sudah sedemikian tertinggalnya dan mengakibatkan munculnya dan menguatnya paham intoleransi dan lahirnya *hoax-hoax* politik secara menyeluruh. Orang tidak lagi berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi," ucapnya. Akhirnya, dikatakan Ray, politik instrumen justru melibas kekuatan politik akal budi yang tidak diperhatikan. Situasi tersebut juga diperparah dengan masuknya berbagai kasus terkait Pilkada serentak 2017.

"Pada tahun 2017 sebaiknya tidak kembali berfokus pada politik instrumen dan mengenyampingkan politik yang bersifat rohani atau politik akal budi," ucapnya.

Ray meyakini, Presiden Jokowi juga sudah menyadari kekurangan pembangunan politik akal budi di masa pemerintahannya. Oleh sebab itu, sejak akhir tahun lalu, Jokowi pun sudah melakukan safari politik. Tujuannya, untuk merangkul semua golongan.

"Presiden sudah menyadari kekeliruan ini. Politik akal budi tidak bisa ditinggalkan, mulai dari silaturahmi ke tokoh-tokoh agama. Semua harus dilakukan secara terus menerus dan dilakukan pendekatan kultural, edukasi publik, dan bukan tindakan represif," ujarnya.

Sumber: <http://www.beritasatu.com/politik/408481-presiden-diminta-tingkatkan-pembangunan-politik-akal-budi.html>

## Parlemen Berkualitas Harus Diwujudkan

*Pola rekrutmen kader oleh partai politik yang hendak menjadi caleg perlu diperbaiki.*

**JAKARTA (HN)** - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan lembaga representasi partai politik (parpol) yang memiliki kuasa di parlemen. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berharap, partai politik berperan aktif dan efektif dalam menyodorkan kader terbaiknya menjadi anggota dewan.

Lucius menyarankan, pola rekrutmen kader partai politik perlu diperbaiki ke depan. Tujuannya demi menghadirkan parlemen yang berkualitas memproduksi undang-undang maupun mengkritik pemerintah. Sepanjang 2016, parlemen dinilai belum bisa memberikan kinerja yang berprestasi. Dia khawatir, tahun ini hal serupa terulang jika tak menanamkan keseriusan sejak dini.

"Belum ada kesadaran dan keseriusan dari DPR dalam kinerja sebagai lembaga legislatif. Fungsi kerja DPR sangat sederhana, salah satunya membaca pergerakan perubahan di tengah masyarakat, kemudian diformulasikan ke dalam undang-undang. Fakta yang terjadi, mereka (DPR) tidak menyentuh hal-hal seperti itu," katanya di Jakarta, Senin (9/1).

Menurut Lucius, keseriusan partai politik membenahi pola rekrutmen kader di tingkat daerah maupun pusat belum terlihat. Para kader di DPR sejak awal sudah terperangkap kepentingan-kepentingan elitis yang ada sebelum mereka terpilih menjadi anggota legislatif. Prediksi Lucius, "Jika berharap perubahan yang diawali dari parpol akan sulit, termasuk dari DPR."

"Saya meyakini, dunia yang semakin modern didukung teknologi canggih bisa membentuk komunitas baru, sekaligus memberikan arahan guna membuka mata, sehingga melahirkan kebijakan yang lebih mendarat kepada rakyat," ujar Lucius.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti berpendapat, sepanjang 2015-2016, pemerintahan Presiden Joko Widodo cenderung melupakan aspek politik akal budi yang berimbang menguatnya politik identitas di akhir 2016. Itu akibat presiden terlalu fokus terhadap politik infrastruktur sehingga isu politik identitas yang semestinya prioritas menjadi terabaikan.

"Politik akal budinya hilang, hanya instrumen politik saja. Ini tidak salah, namun efeknya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," kata Ray.

Sebelum aksi besar-besaran umat Islam akibat kasus dugaan penistaan agama Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), presiden cenderung melupakan aspek persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, pasca-aksi itu terjadi, presiden mulai menyadari pentigannya politik akal budi. "Presiden mulai rajin safari politik ke berbagai elemen bangsa termasuk tokoh-tokoh agama."

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Yandri Susanto mengakui anggota dewan cenderung sepi kala rapat komisi maupun paripurna. Namun, Yandri menyatakan tidak mengetahui hal yang melatari ketidakhadiran anggota DPR dalam rapat biasa maupun penting sekali pun. "Kecuali pas rapat reses (kemarin), semua datang karena menyangkut penambahan pimpinan di DPR."

"Saya sepakat dengan adanya perbaikan pola rekrutmen kader partai yang akan menjadi caleg. Perbaikan bisa saja melalui revisi UU Parpol yang saat ini sudah disetujui DPR dengan pemerintah untuk dibahas bersamaan RUU Pemilu. Keluhan yang ada saat ini, banyak caleg yang tidak berkualitas dan memahami makna sebagai anggota DPR," katanya.

Sumber: <http://www.harnas.co/2017/01/10/parlemen-berkualitas-harus-diwujudkan>

# Legislasi DPR Kedepankan Politik Infrastruktur

*Ruang haley penuh jika membahas RUU MD3 karena itu menyangkut kepentingan DPR. Padahal, ada 50 RUU menunggu.*

Anir Mulwan  
anir.mulwan@mediaindonesia.com

**D**PR kini lebih memprioritaskan membangun infrastruktur politiknya dalam tugas menyusun undang-undang. Legislasi terkait urusan politik justru tertunda.

"DPR membuat UU hanya untuk kepentingan infrastruktur kekuasaannya saja. Kepentingan rakyat tertinggal," cetus Peneliti senior di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Djadjono dalam diskusi Politik Nasional dan Wajah DPR 2017, kemarin.

Ia menyebut sejumlah indikasi. Pertama, kitanya revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pembahasan perubahan UU ini dapat dilakukan dalam masa reses di Badan Legislasi DPR dan dihadiri mayoritas anggotanya. Pengambilan persetujuan untuk pembahasan tingkat II pun langsung digelar pada sidang paripurna masa sidang berikutnya.

Sebaliknya, penyelesaian perundang-undangan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, seperti RRU Laminan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat, RRU tentang Penghapusan Kekerasan Sosial, RRU tentang Perkuliahan Pasca-tan belum juga tuntas walaupun sebelumnya ditargetkan selesai di masa sidang II lalu. "Ini menandakan bahwa penyelesaian Prolegnas Prioritas maupun pembahasan dan penyelesaian RRU tidak pada kepentingan politik praktis di DPR, bukan mengacu pada urusan kebutuhan prioritas bangsa yang sesungguhnya," jelas Djadjono.

Kedua, penyusunan Prolegnas yang sukukola, tanpa visi. Selama 2016, ada tiga kali perubahan daftar Prolegnas



**POLITIK DAN WAJAH DPR 2017:** Anggota DPR dari Fraksi PKS Yandi Soearto (kiri) bersama dengan peneliti Formappi M Djadjono (tengah) dan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti (kanan) berbicara dalam diskusi di Jakarta, kemarin. Diskusi yang mengangkat tema Politik Nasional dan Wajah DPR 2017 itu membahasakan situasi dan wajah politik DPR terkait dengan kinerja anggota dewan.

Prioritas yang sudah disepakati pada 26 Januari 2016, yakni penambahan 10 RUU prioritas (20 Juni), dan penambahan RUU MD3 (13 Desember). Akibat, jumlah total RUU di Prolegnas Prioritas mencapai 51 buah. "Dengan mencermati dinamika di tahun lalu, kita tidak berharap banyak ada prestasi kinerja yang signifikan dari DPR di 2017. Bukannya ada diskusi menarik, yang ada hanya bagi bagi kekuasaan, politik dagang sapi," imbuh Peneliti di Formappi Lucius Karim.

**Ikuti Presiden**  
Direktur Lingkar Madani untuk Indone-

### Badan Legislasi DPR mengakui saratnya kepentingan politik dalam penyusunan revisi UU MD3.

kebijakannya itu ialah mencuatnya politik identitas, penyebaran kabar bohong alias Anas di dunia maya. "Jukowi lupa dalam mengisi substansi itu, politik etika, hanya fokus gimana kerja dan infrastrukturnya," ujar Ray.

Badan Legislasi DPR Yandi Soearto mengakui adanya kepentingan politik dalam penyusunan revisi UU MD3. Menurutnya, piloknya tak bisa berarti banyak mengingat proses ini telah lebih dari delapan minggu.

"Pernah tuang ulang waktu dalam RUU MD3 itu dalam menyangkut kepentingan DPR. Sekarang, masih ada 30 RUU menunggu di prolegnas prioritas. Misalnya, Jokowi bilang enggak perlu banyak banyak UU," itu dia yang merupakan anggota Fraksi PAN.

Sar diteliti pekan lalu, Ketua DPR Surya Novanto mengakui sudah meninjau Sekren DPR melabakan evaluasi kinerja ini sekaligus membuat program dalam rangka ini demi pengalihan kinerja dewan. Hal ini akan dibarengi oleh perubahan kearifan yang lebih efektif dari para Wakil Ketua DPR. (D-2)

BERITA BOHONG

## Tak Cukup Hanya Penegakan Hukum

JAKARTA, KOMPAS — Untuk menghadapi penyalahgunaan informasi di dunia maya, Kepolisian Negara RI tak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan edukasi kepada masyarakat. Untuk itu, Polri akan meningkatkan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk meningkatkan edukasi tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (9/1), mengatakan, langkah itu dilakukan Polri karena penyebaran konten kabar bohong atau *hoax* tak cukup dan tak bisa hanya dibentengi dengan penegakan hukum semata.

"Membangun kesadaran publik di internet merupakan hal penting. Kami sebenarnya tak ingin menggunakan upaya hukum, tetapi lebih memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi, kami bersama pemerintah akan membangun ketaatan dan kepatuhan mengelola dunia maya," tutur Boy.

Langkah edukasi itu, lanjut Boy, melibatkan antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI, organisasi kemasyarakatan/keagamaan, dan tokoh. Untuk itu, edukasi yang akan dibangun adalah norma-norma sosial dan hukum.

"Masyarakat harus memahami internet, terutama medsos, sebagai ranah publik. Alhasil, setiap individu harus menghormati norma sosial dan juga harus menaati norma hukum," papar Boy.

Hal senada diungkapkan pakar media sosial Nukman Luthfie. Ia menegaskan, penyebaran berita bohong tak akan bisa diredam jika pemerintah sekadar bersandar pada penegakan hukum.

Menurut Nukman, edukasi penggunaan internet di masyarakat harus dimulai dari hal-hal mendasar, yaitu menumbuhkan minat baca di sekolah. Setelah itu, pemerintah perlu meleng-



**Kami bersama pemerintah akan membangun ketaatan dan kepatuhan mengelola dunia maya.**

Boy Rafli Amar

kapi dengan meningkatkan pengetahuan literasi saat menggunakan media sosial.

Kelemahan masyarakat Indonesia saat membaca, lanjut Nukman, menyebabkan maraknya penyebaran berita bohong. *Netizen* Indonesia sering menyebarkan informasi hanya berdasarkan judul sebuah artikel tanpa lebih dulu membaca isinya. Karena itu, terjadi kesalahan persepsi dalam memahami konten informasi.

"Pemerintah harus menggalakkan gerakan agar *netizen* memastikan kebenaran informasi sebelum berbagi, misalnya dengan memverifikasi informasi lewat Google. Intinya, pemerintah harus menumbuhkan semangat literasi agar *hoax* tak 'dimakan' begitu saja," tutur Nukman.

### Pemicu

Dalam diskusi yang digelar Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Direktur Lingkaran Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, kekosongan gagasan berbagai program politik orisinal elite politik selama ini dianggap jadi pemicu maraknya penyebaran berita bohong.

"Isu-isu pembangunan bangsa diabaikan, sedangkan isu-isu sensitif suku, agama, dan antargolongan jadi lebih dominan di ruang publik," ujar Ray Rangkuti.

(SAN/OSA/RAM)